

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Ariesta, Freddy Widya, *Implementasi Teori Belajar Humanisme Dalam Pandangan Abraham H. Maslow & Carl Rogers*, 2021

Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1991)

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, ke-IV (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)

Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, ke-9 (bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)

Harjono, Dhaniswara K, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, ke-1 (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Hartini, Rahayu, 'Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', 2008, hlm. 17

Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jilid I (Jakarta: PT. Ind-Hil-Co, 2005)

Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Khairandy, Ridwan, Dosen Fh, and U I I Yogyakarta, 'Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan

Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif', 116, 343–58

Kusumaatmadja, Mohctar, 'Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional', 1976, hlm. 13

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Ke-7 (Prenada Media, 2021)

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2004)

MIRU, AHMADI, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Moonti, H Usman, *Matakuliah Dasar-Dasar Koperasi* (Yogyakarta: Interperna, 2016)

Mulyadi, Lilik, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)* (bandung: Alumni, 2010)

Nasution, Bismar, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum', 18 (2003), hlm. 1

Notonagoro, 'Dengan Rasa Kemanusiaan Yang Adil Terhadap Diri Sendiri, Terhadap Sesama Manusia, Dan Terhadap Tuhan', 1967

Paterson, Jeannie Marie, 'GOOD FAITH DUTIES IN CONTRACT PERFORMANCE', 9342.September (2015)  
<<https://doi.org/10.1080/14729342.2015.1047655>>

Prasetyo, Teguh, 'Teori Hukum Yang Berangkat Dari Postulat Sistem;

Bekerja Mencapai Tujuan', 2015, hlm. 44

Santoso, Agus, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, ke-VIII (Jakarta: Kencana, 2015)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1984)

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Sriwijastuti, 'Lembaga Pkpu Sebagai Sarana Sestructuri Sasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor', 2010, hlm. 29

Surnami, 'Hukum Kepailitan', 2009, hlm. 211

Sutrisno, H. Zaeni Asyhadie dan Budi, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, ke-1 (Jakarta: Erlangga, 2013)

Syahdeini, Sutan Remmy, 'Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Kepailitan', 2008, hlm. 328

*Tujuan Negara Kesejahteraan Pancasila Sebagai Mana Tertuang Dalam Alinea Ke-Empat Pembukaan UUD'1945*

Tumbuan, Fred BG, and Rudy A Lontoh, 'Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', 2001, hlm. 50

Ui, F H, 'Universitas Indonesia Kajian Kontrak...', Arkie V. Y. Tumbelaka,

FH UI, 2012', 2012

Umar haris sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: NFP Publising, 2014)

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*

*Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Widjaja, Gunawan, 'Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Pailit',  
"Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor Dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan Yang Pailit", 2009, hlm. 149

Wiyono, Eko Hadi, *Buku KAMUS BAHASA INDONESIA LENGKAP*, ke-1  
(Jakarta: Akar Media, 2007)

Yohanes, Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2009)

Yustia, Rd. Dewi Asri, *Buku Panduan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, ke-1 (Bandung: Pusat Pengembangan Ilmu Hukum, 2019)

**B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Pembukaan UUD'1945 Alinea Ke-Empat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.